

Kekuatan dari hasil persetujuan internasional tidak akan bertahan, jika negara pelaksananya tidak mampu menjaga kekuatan dari konvensi internasional tersebut. Negara dengan wilayah kedaulatan laut yang kuat baru akan terwujud dengan dilaksanakannya dua langkah perjuangan secara bersama-sama; yaitu langkah perjuangan diplomasi dan perbaikan yang menyeluruh terhadap sektor kelautan di dalam negeri.

Dengan usaha yang panjang dan berani, Delegasi Indonesia telah meminta kepada dunia internasional untuk melayakkan negara Indonesia memiliki wilayah laut yang luas di dalam daerah kedaulatannya, untuk dijaga dan dipakai bagi kesejahteraan Indonesia dan dunia. Dunia internasional—melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)—akhirnya mewujudkan keinginan Indonesia atas keutuhan wilayah lautnya.

Oleh karena itu, adanya upaya peningkatan dan perbaikan terhadap sektor kelautan Indonesia merupakan langkah pembuktian kepada dunia internasional bahwa perjuangan Delegasi Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut Internasional tidaklah sia-sia, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sungguh layak dengan asas negara kepulauan yang telah dimilikinya.

DAFTAR SUMBER

Arsip

Koleksi Arsip Nasional Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia*.

Sumber Primer yang Telah Diterbitkan

Bahar, Saafroedin dan Nannie Hudawati (Peny), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia : 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998.

Hamzah, Dr.A. S.H., *Laut, Teritorial dan Perairan Indonesia : Himpunan Ordonansi, Undang-Undang dan Peraturan Lainnya*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1984.

Himpunan Pidato Presiden Republik Indonesia Tahun 1977, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Ketetapan MPR RI Tahun 1973: Naskah Departemen Penerangan Republik Indonesia (cetakan ketiga), Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1976.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Tambunan, Artha, dkk, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*, Jakarta: Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, 1983.

Sumber yang Belum Diterbitkan

Drs. Sutanto, *Pengaruh UNCLOS '82 Terhadap Pertahanan Keamanan Negara di Laut*, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok: Thesis yang belum diterbitkan, 1993.

Trisulistiyono, Singgih, *50 Tahun Deklarasi Djuanda: Mengembangkan Kesadaran Wawasan Nusantara Bagi Masyarakat Indonesia* (Makalah pada Seminar 50 Tahun Deklarasi Djuanda), 13-14 Desember 2007.

Zuhdi, Susanto, *Perspektif Tanah-Air dalam Sejarah Indonesia*, (Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia), 2006.

Koran

Berita Indonesia : Membawa Soeara Rakjat Merdeka Tahun 1948 dan 1957.

Harian Umum : Surat Kabar Kebangsaan Non-Partai Tahun 1957-1958.

Majalah

Majalah Satria Studi Pertahanan, Vol.4 No.2, April-Juni 2008,

Tempo, Juni dan September 1976.

Buku

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Luar Negeri, 1986.

Basrie, Drs.Chaidir. M.Si., *Wawasan Nusantara Wawasan Nasional Indonesia*, Jakarta: Lembaga Ilmu Humaniora Institut Teknologi Indonesia, 1995.

Booth, Anne, William.J.O'Malley dan Anna Weidemann (Peny), *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1988.

- Danuredjo, Sumitro.L.S., *Hukum Internasional Laut Indonesia*, Jakarta: Bharatara, 1971.
- Danusaputro, Prof.Mr.St. Munadjat, *Wawasan Nusantara : dalam Pendidikan dan Kebudayaan (Buku III)*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Djalal, Dino. P., *The Geopolitics of Indonesia's MaritimeTerritorial Policy*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1996.
- Djalal, Hasjim, *Indonesia and The Law of The Sea*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995.
- Djalal, Hasjim,dkk, *Setengah Abad Deklarasi Djuanda 1957-2007: Sejarah Kewilayahan Indonesia (Kumpulan Makalah)*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007.
- Djamin, Awaloedin (Peny), *Ir. H. Djuanda : Negarawan, Administrator, dan Teknokrat Utama*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2001.
- Engelen, O.E.,dkk, *Lahirnya Satu Bangsa dan Negara*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1997.
- Hakim, Drs. Masfar. R dan Zamzulis Ismail, BA, *Laksamana R.E. Martadinata*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1984.
- Jusuf, Sudono, *Sedjarah Perkembangan Angkatan Laut*, Pusat Sedjarah ABRI: Departemen Pertahanan dan Keamanan, 1971.
- Kahin, George Mc.Turnan, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik : Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (diterjemahkan oleh: Nin Bakdi Soemanto), Solo: Sebelas Maret University Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995.

- Kanumoyoso, Bondan, *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.
- Koers, Albert. W., *Konvensi PBB tentang Hukum Laut : Suatu Ringkasan*, Yogyakarta: Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Gadjah Mada University Press.
- Komar, Mieke, Ety. R. Agoes dan Eddy Damian (ed), *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan (Kumpulan Karya Tulis Menghormati 70 Tahun Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.)*, Bandung: Alumni, 1999.
- Kusumaatmadja, Prof.Dr. Mochtar. S.H., LL.M., *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, Bandung: P.T. Alumni, 2003.
- Lapian, A.B. dan P.J. Drooglever (peny), *Menelusuri Jalur Linggarjati*, Jakarta: Pustaka Utama, 1992.
- Purwaka, Tommy. H., *Pelayaran Antar-Pulau Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Bumi Aksara, 1993.
- Rahardjo, Iman Toto. K. dan Herdianto. W.K. (ed), *Bung Karno dan Ekonomi Berdikari: Kenangan 100 Tahun Bung Karno*, Jakarta: Grasindo (bekerjasama dengan Panitia Peringatan 100 Tahun Bung Karno), 2001.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern* (diterjemahkan oleh Dharmono Hardjowidjono), Jogjakarta : Gadjah Mada University Press, 1999.

Simanjuntak, P.N.H. S.H., *Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Soerapoetra, H.R. Soenar, *Sejarah Pelayaran Niaga di Indonesia Jilid II: Seperempat Abad Pelayaran Nasional di Indonesia (1945-1970)*, Jakarta: Yayasan Pusat Studi Pelayaran Niaga di Indonesia, Juli 2001.

Sulistiyono, Singgih Tri, *Pengantar Sejarah Maritim Indonesia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional: Program Hibah Penulisan Buku Teks, 2004.

Suraputra, D. Sidik, *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1991.

Wallace, Rebecca. M.M., *Hukum Internasional*, London : Sweet and Maxwell, 1986.

Lampiran 1.

Deklarasi Djuanda